



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Klarifikasi oleh Pimpinan DPR Dinilai Tak Cukup
Tanggal : Selasa, 07 Juli 2020
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

DANA CSR BUMN

Klarifikasi oleh Pimpinan DPR Dinilai Tak Cukup

JAKARTA, KOMPAS — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menilai pelibatan anggota DPR dalam penyerahan program tanggung jawab sosial korporasi (CSR) dari badan usaha milik negara sektor tambang sebagai bentuk pengawasaan. Alasannya, anggota DPR dianggap paling memahami kebutuhan di setiap daerah.

Namun, pimpinan DPR dinilai tak berwenang menangani permasalahan tersebut. Sebagian kalangan menilai, forum Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) lebih tepat menyelesaikan persoalan yang melibatkan program CSR itu.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Nasdem Rachmat Gobel mengatakan, pelibatan anggota DPR dalam penyerahan CSR BUMN sektor tambang di masa pandemi Covid-19 untuk memaksimalkan fungsi pengawasaan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 serta Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dengan begitu, katanya, kontribusi dari BUMN tersebut bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Yang disampaikan pimpinan Komisi VII pada saat rapat dengar pendapat sudah sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," ujar Gobel sekuat meminta klarifikasi terhadap pimpinan Komisi VII DPR terkait polemik permintaan pelibatan anggota DPR dalam penyerahan CSR BUMN, Senin (6/7/2020), di kompleks Senayan, Jakarta.

Dalam proses klarifikasi yang berlangsung tertutup sekitar 30 menit itu hadir Gobel didampingi Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco. Hadir pula Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Alex Noerdin, Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian, dan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno.

Sebelumnya, peristiwa sejumlah anggota DPR meminta dilibatkan dalam pembagian CSR dari BUMN mengemuka saat rapat Komisi VII DPR dengan Holding Industri Pertambangan BUMN.

MIND ID, Selasa (30/6). Dalam rapat itu terjadi pula insiden pengusiran Direktur Utama MIND ID Orlas Petrus Moedak oleh anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Nasir.

Sementara itu, Alex Noerdin menyatakan, di dalam rapat Komisi VII dengan BUMN, pihaknya hanya ingin mengingatkan BUMN sektor tambang agar anggota DPR diundang saat pemberian CSR kepada masyarakat. Dia mengklaim tak ada sedikit pun tujuan meminta agar dilibatkan dalam pemberian CSR kepada masyarakat itu.

Alex membantah bahwa hal itu sebagai bentuk permintaan. Menurut dia, semua dijalankan sebagai bentuk pengawasaan Komisi VII terhadap mitra kerjanya. Lagi pula, lanjutnya, anggota DPR paling memahami kondisi daerah pemilihannya masing-masing.

Ia pun membantah anggapan bahwa pelibatan anggota DPR dalam penyerahan CSR sebagai bentuk aji mumpung untuk meningkatkan citra di mata masyarakat. "Enggak, dong. Aji mumpung apanya. Tak ada politisasi," katanya.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, menyampaikan, proses klarifikasi yang dilakukan pimpinan DPR terhadap pimpinan Komisi VII tidak menyelesaikan pelanggaran etik yang dilakukan anggota Komisi VII. Pimpinan DPR hanya mengurus koordinasi antar-komisi dan anggota DPR, bukan dugaan penyimpangan etik anggota. Seharusnya proses klarifikasi dibawa ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Ini sangat disayangkan. Klarifikasi tak menghilangkan dugaan publik terkait permintaan dana CSR. Klarifikasi sifatnya sepihak juga karena mereka masih separtai, sefraksi, serta bagian dari DPR juga antara anggota dan pimpinan DPR. Kalau mau diperiksa secara terbuka di MKD dan mempertanggungjawabkannya kepada publik," ujar Lucius.

Menurut Lucius, proses klarifikasi penting dibawa ke MKD karena di waktu yang sama juga terjadi pengusiran dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh anggota DPR. "Ini hal-hal yang berkelindan yang membuat klarifikasi yang dilakukan pimpinan DPR itu tak punya makna apa-apa dan tak mengurangi dugaan yang muncul ke publik karena publik punya penilaian sendiri," ucap Lucius. (BOW)

Proses klarifikasi yang dilakukan pimpinan DPR terhadap pimpinan Komisi VII tidak menyelesaikan pelanggaran etik yang dilakukan anggota Komisi VII.